

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai seorang individu dan tepatnya sebagai satu pribadi, manusia tak akan bisa hidup dan berkembang berdasarkan kemampuannya sendiri. Dia membutuhkan lembaga-lembaga sosial, dia membutuhkan masyarakat dan negara (Maran, 2007:7). Dalam perspektif ini manusia disebut sebagai makhluk politis. Oleh karenanya seorang manusia disebut sebagai makhluk politis dikarenakan kehidupan yang dijalani oleh manusia tidak luput akan kondisi lingkungan sosial, masyarakat, organisasi, berbangsa dan bernegara.

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008: 404). Fungsi partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun hak untuk berkumpul dan berserikat. Oleh sebab itu kehadiran partai politik dalam kegiatan politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasarkan fungsi dan tujuan yang melekat pada partai politik. Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Di Indonesia organisasi adalah, cara mengatur dan mendidik serta memberi pengalaman untuk anggotanya dan dalam budaya keorganisasian memiliki kekuatan sosial yang tidak nampak dimana seseorang akan mampu bekerja sesuai apa yang diinginkan oleh organisasi tanpa disadari. Budaya organisasi, memiliki nilai-nilai yang menginternalisasi dalam diri anggotanya, menjiwai perorang dalam organisasi. Adapun pengertian nilai budaya organisasi telah dirumuskan oleh beberapa ahli, menurut Koentjaraningrat (1987:85), nilai budaya organisasi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang

ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia di dalam kebudayaan organisasi.

Pada praktiknya kebudayaan organisasi dikemas dalam model pengkaderan atau perekrutan partai politik dan terdapat perbedaan tergantung kepentingan, visi misi dan tujuan partai politik. Budaya kaderisasi sendiri memiliki banyak macam dalam praktiknya. Kaderisasi yang dilakukan partai sendiri bertujuan berdasarkan kriteria komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan partai *cath-all*. Partai *Cath-all* merupakan gabungan dari partai kader dan masa (Cholisin, 2004: 161). Partai politik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar masyarakat, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2008:15). Partai politik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kaderisasi dalam partai politik memegang peranan penting, karena kaderisasi menentukan kualitas dan keberlangsungan partai politik. Setiap partai politik memiliki standart dalam kaderisasi bagi calon kadernya yang mengacu pada nilai-nilai ideologis partai politik tersebut. Standart kaderisasi politik biasanya diberlakukan saat proses penyeleksian yang disertakan dalam pemilihan calon. Seleksi pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah proses yang nantinya akan memegang peranan penting dalam sistem perpolitikan. cara dalam memberikan pendidikan Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 188) *Civic skills* mencakup *intelectual skills* (ketrampilan

intelektual) dan *participation skills* (ketrampilan partisipasi). Ketrampilan intelektual adalah ketrampilan yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah ketrampilan berpikir kritis

Sistem kaderisasi kepemimpinan di DPC PDI Perjuangan terdiri dari proses rekrutmen, seleksi kader dan pendidikan kader merupakan proses berkesinambungan yang dilakukan partai untuk mempersiapkan calon pemimpin internal partai yang nanti akan menjadi calon pejabat publik. Proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat akan menambah pemahaman anggota PDI Perjuangan tentang Pancasila khususnya sila ke 4 yang berbunyi permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan anggota kader partai dan calon pemimpin apabila tidak ditemukan kemufakatan, dilakukan dengan voting atau pengambilan suara terbanyak akan meningkatkan kejujuran dan keterbukaan tiap anggota dan kader partai terhadap aspirasi mereka, sehingga pemilihan calon pemimpin akan berjalan lebih demokratis. Pelaksanaan dalam hal ini merupakan proses atau usaha-usaha untuk mempersiapkan seorang kader secara terencana maupun tidak terencana untuk menjadi pemimpin internal partai yang nantinya akan menduduki sebagai calon pejabat publik (Permana, 2015).

Kaderisasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu informal dan formal. Kaderisasi informal dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan dalam organisasi dimana seorang harus mampu beradaptasi dalam lingkungan yang baru, sehingga mampu bersaing dalam lingkungan yang baru. Kaderisasi formal dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku guna membentuk karakter pemimpin dari calon-calon kader tersebut. Kaderisasi kepemimpinan dilakukan dengan mentranfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian. Nantinya akan digunakan dalam meneruskan tujuan dan perjuangan partai tersebut. Kaderisasi kepemimpinan dalam organisasi berguna untuk mengatur sistem dalam partai. Dapat mengatur serta memiliki visi, dan tujuan yang sama dalam organisasi berlaku Pendidikan karakter merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan krisis karakter pemuda yang dialami Indonesia saat ini, sehingga tidak dipungkiri

setiap jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal mengimplementasikan pendidikan karakter (Majid dan Andayani 2012: 112-113).

Firmanzah (2008) menyebutkan bahwa partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakilinya. Ketika menjadi pemimpin nasional, otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya, Berpikir efektif dalam menetapkan keputusan - berfikir merupakan potensi psikis yang sangat istimewa, yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berfikir yang diberikan Tuhan yang maha esa pada hewan, sebagai makhluk ciptaan-nya yang sama-sama penghuni bumi.

Mengkomunikasikan hasil berpikir-hasil berfikir seseorang yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, hasil berfikir tersebut perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan organisasi. Meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah, Kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan parsipasi anggota organisasi secara efektif dan efisien.

Fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah menyeleksi calon pemimpin dan wakil-wakil rakyat melalui proses perekrutan atau rekrutmen politik. Perekrutan politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki kursi jabatan. Perekrutan ini memiliki proses dua-arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal (Rush dan Althoff, 2000: 23). Berkaitan dengan rekrutmen politik, sebagaimana bunyi Pasal 11 ayat 1 UU No 2 Tahun 2008 menjelaskan tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai Manusia sebagai makhluk sosial, mengharuskan manusia selalu berusaha untuk berhubungan dengan manusia lain, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya demi memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa tingkatan kebutuhan manusia. (Kartono, 2002) Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi maka pemecahan masalah dalam organisasi dapat terpecahkan. Menggali dan Meningkatkan Kreativitas - Proses menggali dan meningkatkan kreativitas anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan.

Dengan adanya perekrutan dan kaderisasi, diharapkan mampu menciptakan kualitas pemimpin yang dapat meneruskan perjuangan, ideologi, dan visi dari organisasi partai. Seperti pada masa orde baru kepemimpinan soeharto. Dimana kehadiran partai politik tidak seberapa diperhitungkan. Dikarenakan pada saat itu peran partai politik tidak seberapa di pergunakan dikarenakan partai politik tersebut tidak mampu menjalankan fungsi dengan semestinya. Dikarenakan sebagian orang yang memegang kendali dalam rezim pada waktu itu. Dengan mengendalikan posisi-posisi strategis pada sistem pemerintahan. Yang didasari untuk merebut merebut kekuasaan secara konstutional. Dan pada tahun 1998 setelah runtuhnya rezim ordebaru. Peta perpolitikan berubah dan munculah rezim demokrasi. Dengan ditandai dengan muncul partai-partai baru yang memberi pengaruh pada perpolitikan indonesia hingga pada saat ini. Sehingga partai politik dianggap memiliki peranan penting. Baik dalam proses perekrutan atau budaya kaderisasinya guna menentukan pemimpin birokrat atau pejabat negara. Seperti yang dikatakan Azwar (2008: 2), Sebagai lembaga negara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan berdiri dengan tujuan sebagai alat perjuangan bangsa. Pada umumnya partai politik memiliki fungsi sebagai komunikasi politik, sosialisasi politik, dan pengatur konflik (Azwar, 2008: 2).

Lebih lanjut Azwar (2008: 2) juga. menjelaskan, pada tahun 2007 dan 2008 masyarakat menolak adanya monopoli sumber rekrutmen politik oleh partai

politik. Masyarakat menilai bahwa kepentingan-kepentingan yang diusung oleh partai politik kebanyakan adalah kepentingan lembaga tersebut. disebabkan lemahnya sistem perekrutan dan kaderisasi partai politik. Yang kalah dengan sistem politik kekerabatan. Sehingga mampu mengganggu budaya kaderisasi dan dianggap tidak sehat. Dengan tidak adanya nilai-nilai demokrasi yang berdasar pada anggota katau kader partai. Ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam pelaksanaan rekrutmen politik sendiri, sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau kepentingan pribadi sehingga seseorang mudah menjadi pengurus partai.

Politik kekerabatan didasari dengan pemusatan keluarga dan kerabat yang menduduki kursi pemerintahan atau memegang jabatan politik. Yang Menjadi sebuah mekanisme serta melegitimasi dan memperkuat basis kekuasaan politik. Yang membentuk kerajaan-kerajaan kecil di tingkat daerah ataupun tingkat nasional. (Harjanto, 2011)

Selain politik kekerabatan adapula dari partai politik, dengan mengusung calonnya untuk menduduki kursi birokrat atau pun daerah, atas dasar popularitasnya seperti para artis atau pengusaha, popularitas dianggap mereka sebagai cara agar mampu meraup dan meraih suara dalam pileg, pilkada, pilgup, pilpres. Yang merupakan suatu cara instan dimana tanpa melalui budaya kaderisasi pada semestinya. Tentunya ini menjadi bentuk ketidakadilan dalam internal partai. Dengan memunculkan konsolidasi demokrasi antara partai dengan para artis. Tentunya fenomena ini tidak adil bagi anggota partai atau kader partai yang sudah mengabdikan sejak lama dan berdedikasi di dalam partai yang dimana karirnya tertutup oleh ketenaran artis yang mendapatkan hak istimewa dari partai mencalonkan orang dalam politik atas kepopulerannya (Mietzner, 2009) model rekrutmen dan kaderisasi instan ini dengan bermodal kepopuleran artis untuk dapat menunjang atau mendorong suara partai dengan ini politik sebagai industri ekonomi. Dimana perjuangan untuk kepentingan umum yang didasari atas penawaran untuk mendapatkan kekuasaan.

Sementara itu, kader lama yang kurang populer akan di gunakan sebagai cadangan dan tidak akan mendapatkan “panggung politik kurangnya apresiasi terhadap kader lama akan menimbulkan runtuhnya kondisi internal partai. Yang dimana partai politik lebih mementingkan kemenangannya dari pada kesejaterahan kadernya. Dan jarang memikirkan tentang kemenangan jangka panjang. sehingga abnormali dan absurditas dengan mendukung parpol-parpol besar dalam hal perpolitikan demi terjaminnya kemenangan pilkada. (Harjanto, 2011:139) partai politik memiliki kelembagaan yang baik akan memberikan pendidikan politik di dalam budaya kaderisasinya baik dalam budaya kaderisasinya ataupun sesudah budaya kaderisasinya. Dengan tujuan meningkatkan kualitas kader sehingga mampu bersaing dalam pertarungan politik secara bebas baik di internal ataupun diluarnya.

Pandangan umum mengenai budaya kaderisasi dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu: pelaku kaderisasi (subyek) dan sasaran kaderisasi (obyek). Subyek yang di artikan sebagai pelaku kaderisasi dari sebuah organisasi adalah individu yang dipersonalifikasi dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Selanjutnya adalah obyek atau sasaran kaderisasi, yaitu individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Sifat sebagai subyek dan obyek dari budaya kaderisasi ini sejatinya harus memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader organisasi yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis.

Penelitian terdahulu tentang kaderisasi partai politik dilakukan oleh Harjanto (2011), yang menghasilkan temuan bahwa kaderisasi kepemimpinan di partai politik merupakan salah satu fungsi penting yang seharusnya mendapat prioritas, karena parpol masih menjadi saluran utama rekrutmen kepemimpinan di daerah dan nasional. Sayangnya, parpol di Indonesia mengalami permasalahan serius dalam hal ini seperti tampak dalam menguatnya politik kekerabatan maupun seringnya parpol menominasikan tokoh luar atau non-parpol dalam pemiIukada demi memenangkan kursi-kursi politik. Kegagalan parpol dalam

rekrutmen kepemimpinan memang tidak serta merta kesalahan parpol sendiri. Regulasi, sistem kepartaian, sistem pemilu, dan rejim pemerintahan turut menyumbang bagi kemunduran fungsi penting parpol ini. Kegagalan parpol dalam rekrutmen kepemimpinan di tingkat daerah ini juga tampak dari lemahnya peran parpol dalam mengendalikan para Gubernur, Walikota, dan Bupati yang diusungnya dalam pemilukada. Banyak parpol tidak lagi dilibatkan atau tidak memiliki akses ke para pejabat ini.

Selanjutnya penelitian oleh Panantang (2012), meneliti tentang perekrutan dan model kaderisasi PDIP DPC Kota Kediri. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah: (1) Terdapat dua model rekrutmen yang dikembangkan oleh PDI Perjuangan kota Kediri, yaitu atas inisiatif masyarakat sendiri dan model aktif dari sisi intern partai untuk mencari dan mengajak anggota masyarakat; (2) Model Kaderisasi yang dikembangkan oleh PDI Perjuangan dibagi menjadi dua yakni kaderisasi dengan sistem kelas, dan kaderisasi dengan sistem gerakan; (3) Kendala yang dihadapi oleh PDI perjuangan dalam proses rekrutmen meliputi: pemahaman masyarakat yang beragam dan kemampuan kader dalam cara berkomunikasi. Sedangkan kendala pada model kaderisasi yang diterapkan oleh PDI Perjuangan adalah jenjang kaderisasi yang panjang, materi yang padat membuat anggota atau kader kadang bosan, tingkat daya serap anggota atau kader yang beragam, sulitnya mencari pematani yang mumpuni di tingkat Cabang. Upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi pada proses penerapan model kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Kediri yaitu menerapkan penilaian dalam menentukan kader yang akan diajukan pada pemilu.

Permana (2015) Penelitian ini mengkaji tentang pola kaderisasi kepemimpinan khususnya pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki secara cermat sistem kaderisasi kepemimpinan, cara kerja dan pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan di DPC PDI Perjuangan Kab. Nganjuk. Serta Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik. Hasil penelitian menunjuka bahwa pola kaderisasi kepemimpinan partai politik terdiri dari proses rekrutmen, seleksi



kader, dan pendidikan kader di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Ketetapan Kongres III PDI Perjuangan No.09/TAP/KONGRES III/PDI P/2010 mengungkap penetapan calon anggota dan anggota yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Adapun faktor pendukung adalah kekompakan dan pemahaman yang sama terhadap ideologi Pancasila, sedangkan faktor penghambat adalah: sebagian anggota yang tidak memahami ideologi pancasila sebagai tugas partai.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian oleh terdahulu bertujuan untuk mengetahui proses perekrutan dan model kaderisasi kepemimpinan partai, serta mengungkap kendala-kendala yang dihadapi. Pada penelitian ini dilakukan kajian yang lebih komprehensif, mulai dari proses rekrutmen, kaderisasi, mekanisme pemilihan calon, hingga siasat yang digunakan untuk kemenangan dalam pemilu daerah (legislatif dan eksekutif) di Kota Surabaya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai politik yang mendominasi di Kota Surabaya selama 1 dekade terakhir (Tahun 2010-2019). Selama kurun waktu tersebut para calon yang diusung oleh PDIP berhasil menjabat walikota dan wakil di Kota Surabaya, serta menduduki mayoritas anggota DPRD.

Pemilihan Anggota Legislatif Kota Surabaya yang diselenggarakan pada tahun 2009 untuk memilih anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. PDIP berhasil mendapatkan 8 kursi, meskipun pada saat itu jumlah kursi terbanyak ada pada partai Demokrat 15 kursi. Namun pada Pemilu legislatif Kota Surabaya tahun 2014, PDIP berhasil menempatkan diri sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak, sesuai dengan hasil perolehan total suara partai dan calon versi KPU Surabaya, diketahui perolehan suara PDIP sebanyak 356.939 suara. Selanjutnya peringkat kedua diraih Partai Gerindra dengan 146.343 suara, disusul dengan Partai Demokrat 123.846 suara, PKB 117.006 suara, PKS 64.836 suara, PAN 62.682 suara, Partai Hanura 52.193 suara, Golkar 51.963 suara,

Partai NasDem 46.788 suara, PPP 45.738 suara, PBB 8.223 suara, dan PKPI 5.018 suara.

Pada pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya tahun 2010, pasangan Tri Rismaharini dan Bambang DH merupakan pasangan calon yang diusung oleh PDIP berhasil terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya setelah memperoleh suara terbanyak (40,9%). Mereka mengungguli pasangan Arif Afandi dan Adies Kadir (36,4%), pasangan Fandi Utomo dan Yulius Bustami (11,8%), BF Sutadi dan Mazlan Manzur (5,9%), serta pasangan Fitrajaya dan Naen Suryono (5%). Selanjutnya pada pemilu Walikota Surabaya 2015 yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 untuk pemilihan Wali Kota Surabaya periode 2016-2021, PDIP kembali memenangkan pemilihan, setelah diperoleh hasil bahwa pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana yang diusung oleh PDIP mengungguli perolehan suara dari pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Bahkan pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana memperoleh suara sangat signifikan sebesar 86,34%, sedangkan pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari hanya mengumpulkan suara minoritas sesuai dengan keputusan KPU Kota Surabaya pada 22 Desember 2015.

Keberhasilan calon-calon dari partai tersebut pada pemilu legislatif pada tahun 2014 dan pemilihan walikota Kota Surabaya pada tahun 2010 dan 2015 tidak lepas dari peran partai melalui DPC partai di Kota Surabaya sebagai perwakilan partai di tingkat Kota. Partai memiliki kontribusi mulai dari tahap perekrutan, pemilihan hingga pendaftaran calon saat pemilihan umum.

Terdapat sebuah siasat dalam kaderisasi di PDIP Kota Surabaya, mulai dari proses rekrutmen hingga penentuan calon yang bakal diusung menjadi peserta pemilihan legislatif atau Walikota, hingga peran partai dalam upaya kemenangan calon. Empat hal pokok terkait kandidasi dalam kasus PDI Perjuangan dan Pilkada kota Surabaya. *Pertama* kandidat yang muncul dalam penominasian menghasilkan Whisnu Sakti Buana yang mencerminkan kader yang tumbuh dari organisasi PDI Perjuangan dan Tri Rismaharini sebagai pihak yang mencerminkan segala prestasi tentang tata kelola pemerintahan. *Kedua*, pihak

yang menyeleksi kandidat terbagi dalam beberapa tahap mulai dari bentuk seleksi dari DPC PDI Perjuangan kota Surabaya yang penjangkaran suara penyampaian dukungan dari tingkat anak ranting maupun cabang, kemudian masuk melalui proses penyaringan di tingkat DPD PDI Perjuangan provinsi Jawa Timur dan level tertinggi pada Tingkat DPP PDI Perjuangan yang nanti mengeluarkan rekomendasi dan keputusan maupun perintah. *Ketiga*, ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi territorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik. Sedangkan pada metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai local atau kelompok social intra partai atau kelompok-kelompok seksional. *Keempat*, tahap pemutusan kandidat, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan. (Robby, 2017)

Selain itu bagi kader PDIP yang menjadi calon juga memiliki suatu siasat untuk kemenangan dalam menghadapi persaingan dengan calon-calon yang diusung oleh partai lain. Rosli dan Hariri (2016) menyebutkan bahwa PDIP menggunakan strategi *public relation* yang tercermin dengan adanya upaya PDIP untuk membentuk kader yang kuat melalui pendidikan politik berjenjang serta komunikasi yang dijalin mulai anak ranting hingga DPC. Pendidikan politik yang ada di PDIP terdiri atas tiga jenjang, yaitu tingkat pratama, madya dan lanjut. Materi yang disampaikan dalam pendidikan politik kader yaitu meliputi enam materi wajib di antaranya adalah ideologi partai, pemahaman pancasila, dan lain-lain. Metode pelaksanaan pendidikan politik bagi kader dan non kader dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas dalam bentuk langsung *live-in* (hidup) di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah membentuk kader yang memahami persoalan dari masyarakat secara langsung. Siasat dalam kaderisasi tersebut akan membentuk sebuah kebiasaan yang mempengaruhi perilaku kader-kader PDIP Kota Surabaya dalam mencapai tujuan politiknya. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas siasat manipulatif kader PDIP dalam pemilihan umum di Kota Surabaya.

## **1.2 Rumusan masalah**

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang penelitian ini adalah mengenai bagaimana dinamika yang dialami kader dan siasat manipulatif yang dikembangkan oleh kader untuk mendapatkan elektabilitas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan pertanyaan yaitu untuk mendeskripsikan dinamika yang dialami kader dan siasat manipulatif yang kembangkan dalam mendapatkan elektabilitas.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Manfaat dari penelitian ini secara akademik adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan yang berkaitan dengan Antropologi Politik. Adapun manfaat dari penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas tentang budaya kaderisasi dan strategi kader.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Bagi pihak yang diteliti adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pola rekrutmen atau kaderisasi partai dimasa mendatang dan memberikan masukan bagi calon yang akan diusung dalam pemilihan umum selanjutnya.
- 2) Bagi masyarakat dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan tentang kaderisasi yang diterapkan di PDIP Kota Surabaya dan upaya-upaya yang telah dilakukan kader PDIP untuk memenangkan pemilu di Kota Surabaya.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Konsep Budaya**

Menurut Koentjaraningrat (2002: 203), pengertian kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa budaya memiliki 3 (tiga) wujudnya yakni sistem ide, sistem aktivitas dan fisik. Sistem ide ini didapatkan manusia melalui sosialisasi, internalisasi yang dilakukan masyarakat terhadap generasi selanjutnya dalam budayanya. Mulai sistem ide ini kemudian menghasilkan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan manusia sebagai cara untuk menginterpretasikan ide dari budayanya. Dari adanya perilaku yang dilakukan manusia dalam menerapkan sistem ide yang dimiliki kemudian manusia dapat menghasilkan suatu karya manusia itu sendiri.

Kebudayaan mempunyai unsur unsur yang bersifat universal. Unsur unsur kebudayaan tersebut dianggap universal karena dapat ditemukan pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Menurut Koentjaraningrat (2002:203), ada tujuh unsur kebudayaan universal yaitu:

- 1) Sistem religi
- 2) Sistem Kemasyarakatan/organisasi sosial
- 3) Bahasa
- 4) Sistem Pengetahuan
- 5) Kesenian
- 6) Sistem mata pencaharian hidup
- 7) Peralatan hidup dan teknologi

Ketujuh unsur kebudayaan ini terurai dalam wujud dalam kehidupan masyarakat seperti dalam sistem religi yang mempunyai wujudnya sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus neraka dan sebagainya tujuh unsur kebudayaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Sistem Religi

Koentjaraningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya

kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

## 2) Sistem Kemasyarakatan/Organisasi sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi social merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

## 3) Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Menurut Koentjaraningrat, unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi adalah deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta variasivariasi dari

bahasa itu. Ciri-ciri menonjol dari bahasa suku bangsa tersebut dapat diuraikan dengan cara membandingkannya dalam klasifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga dan subkeluarga. Menurut Koentjaraningrat menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa tidak mudah karena daerah perbatasan tempat tinggal individu merupakan tempat yang sangat intensif dalam berinteraksi sehingga proses saling memengaruhi perkembangan bahasa sering terjadi.

#### 4) Sistem Pengetahuan

Ada banyak sistem pengetahuan misalnya pertanian, perbintangan, perdagangan/ bisnis, hukum dan perundang-undangan pemerintahan/ politik, dan sebagainya. Hal tersebut juga bagian dari kebudayaan. Kita wajib mempelajarinya karena dengan adanya sistem pengetahuan kita menjadi tahu dunia luar dan sangat bermanfaat untuk kehidupan karena berpengaruh pada pekerjaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak perlu semua kita pelajari cukup beberapa saja kita kuasai, maka akan banyak informasi yang kita dapat.

#### 5) Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Jenis seni tradisional adalah wayang,

ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi.

#### 6) Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian sangat diperlukan untuk setiap masyarakat karena bermanfaat untuk memenuhi kehidupan manusia. Misalnya kaumpegawai/karyawan, kaum, petani, nelayan, pedangan. buruh dan seterusnya. Hal tersebut merupakan mata pencaharian yang harus kita tekuni. Contohnya masyarakat yang hidup dipesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan atau masyarakat yang hidup di perkotaan lebih banyak bermata pencaharian sebagai pegawai kantor.

#### 7) Peralatan hidup dan teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. (Koentjaraningrat, 2002: 205)

### 1.5.2 Organisasi Sosial

Koentjaraningrat melihat organisasi sosial ini sebagai unsur yang universal. Karena itu, dimana ada masyarakat manusia, berarti disitulah terdapat unsur yang mendorong manusia berada dalam satu pengaturan, pengorganisasian atau pengelompokan yang berfungsi menunjang kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kehidupan, dan pada akhirnya melestarikan nilai yang telah disepakati oleh semua anggota. Kehidupan masyarakat diorganisasi atau diatur oleh adat istiadat dan aturan berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan mana ia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Karena masyarakat terbagi ke dalam lapisan-lapisan, maka orang yang berada di luar afiliasinya akan berbeda. Perbedaan itu menimbulkan posisi yang berbeda, ada yang tinggi dan ada yang dianggap lebih rendah.



Organisasi sosial oleh Koentjaraningrat dikategorisasikan sebagai salah satu unsur kebudayaan universal. Unsur-unsur tadi ada dan bisa didapatkan di dalam kebudayaan dan semua bangsa dimanapun di dunia. Koentjaraningrat menguraikan posisi organisasi sosial ini menjadi kian penting dalam sebuah masyarakat terutama dalam meneliti masyarakat desa, atau masyarakat yang belum modern. Perbedaan ini sebetulnya bisa jadi merupakan cara untuk mempermudah penguraian tentang organisasi sosial. Hubungan kekerabatan bagi Koentjaraningrat merupakan sebuah fenomena budaya yang menunjukkan organisasi sosial yang masih mudah dijumpai di semua masyarakat. Hubungan kekerabatan ini menciptakan pola-pola khusus baik itu dalam proses maupun dengan nilai yang ada dalam hubungan itu. Pada sebuah masyarakat, hubungan kekerabatan, misalnya yang berdasarkan asas keturunan ayah (*patrilineal*) merupakan unsur yang akan mengikat anggotanya dalam lingkaran aturan yang berlaku.

Hubungan seperti di atas, bisa jadi sudah bergeser. Nilai dan segala proses yang terjadi dalam hubungan kekerabatan mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. Bagi Koentjaraningrat, berubahnya masyarakat ke arah industrialisasi bahkan ke era informasi akan membuat pola organisasi sosial semula, seketika berubah dan mengalami bentuk baru. Dalam masyarakat yang lebih modern, organisasi sosial ini bahkan secara definitif berubah. Muncul kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, lembaga negara, bahkan hubungan lintas negara yang pada kajian budaya masuk dalam unsur dasar yang tidak bisa ditinggalkan. (Ainurhidayat, 2012)

### **1.5.3 Antropologi Politik**

Budaya dalam organisasi partai politik dikemas dalam model pengkaderan atau perekrutan partai politik dan terdapat perbedaan tergantung kepentingan, visi misi dan tujuan partai politik. Fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah menyeleksi calon pemimpin dan wakil-wakil rakyat melalui proses perekrutan atau rekrutmen politik. Perekrutan politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki kursi jabatan.

Ketika memasuki masa pemilihan umum, calon yang diusung oleh partai politik selalu dihadapkan dengan proses kompetisi dengan calon-calon lain yang diusung oleh partai lain. Pada situasi ini, bagi partai pengusung dan calon yang diusung memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan Legislatif atau Walikota dengan melakukan politik mikro melalui siasat manipulatif supaya memenangkan pemilihan umum. Menurut Bailey (1971: 1-25), tiap individu dapat melakukan politik mikro/ *small politics* atau berpolitik dalam kehidupan sehari-harinya. Bentuk berpolitik tersebut berada dalam berbagai aktivitas permainan sosial, ketika mereka berkomunikasi dan melakukan kooperasi serta kompetisi dengan orang lain. Apa yang ingin dicapai dalam berpolitik mikro ialah agar mereka mencapai, mempunyai dan menjaga reputasi/nama baiknya sendiri dan kelompok/komunitas atau daerah asalnya.

Aktor politik mikro, baik individu maupun kelompok, merasa harus menang dalam suatu permainan sosial bersama. Aktor tersebut pandai mengambil keuntungan dari lawan dan aturan bermain tentang pengelolaan lingkungan sosial guna beradaptasi terhadap perubahan lingkungan agar keseimbangan tercapai kembali. Seorang aktor biasanya mempengaruhi masyarakat dalam kemenangan permainan politik (sosial) dengan politik usaha tertentu. Tidak ada aturan permainan yang jujur dalam kompetisi tetapi karena aktornya mempunyai moral, maka ada aturan tidak tertulis yang dipatuhi oleh mereka dalam berkompetisi karena kompetisi hanya dilakukan antar kompetitor saja. Mereka harus tetap menjaga reputasi/nama baik agar tidak kalah dalam permainan, khususnya untuk meraih keuntungan agar reputasi mereka lebih meningkat.

Dalam penelitian ini, siasat manipulatif yang dilakukan calon dengan cara tertentu merupakan sisi politik dalam usaha memenangkan pemilihan. Bailey mengatakan bahwa hakekat politik sebenarnya adalah permainan kompetisi yang didasari oleh aturan-aturan pada semua bentuk anarkhi. Sehingga, segala bentuk perjuangan yang tampaknya kacau sekalipun selalu memiliki pedoman aturan. Baik sadar atau tidak, para pelaku melaksanakan aturan tersebut demi tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Menurutnya, terdapat dua macam aturan yaitu: (1)

aturan normatif atau seharusnya, dan (2) aturan pragmatis yang secara nyata langsung dilaksanakan oleh pelaku.

## **1.6 Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan untuk mengkaji “Siasat manipulatif kader partai politik di Kota Surabaya” adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode etnografi. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data kualitatif. Etnografi adalah bentuk tulisan atau laporan mengenai kehidupan masyarakat dan juga suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog setelah melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini berfungsi sebagai pemahaman secara lingkungan perseptual melalui pemberdayaan dan permasalahan kaderisasi yang dianggap merupakan cara dalam memberdayakan kadernya. Pencarian tentang lingkungan perseptual melalui pemberdayaan dan permasalahan kaderisasi ini dapat ditemukan dengan cara menanyakan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dari permasalahan. Lalu si peneliti akan mencari seseorang yang dianggap bisa memenuhi kriteria untuk menjadi informan dari masalah yang diteliti. Informasi yang didapat juga dilengkapi dengan fasilitas seperti recorder handphone dan catatan buku untuk mendokumentasikan data lapangan bersama informan ataupun kondisi lapangan. Sehingga selama dilapangan mampu mendapatkan data yang akurat dan benar (Spradley, 2007).

Penelitian ini berfokus mengkaji budaya kaderisasi mulai dari rekrutmen hingga penentuan kader partai yang akan diusung sebagai calon dalam pemilihan legislatif dan pemilihan walikota di Kota Surabaya. Selanjutnya mendeskripsikan strategi yang dikembangkan calon untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam pemilihan legislatif dan pemilihan walikota di Kota Surabaya. Penggunaan metode etnografi melalui observasi dan wawancara secara mendalam dapat menghasilkan data secara detail, sehingga dapat diperoleh gambaran realitas secara holistik.

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) salah satu Partai Politik di Kota Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian

berdasarkan pertimbangan bahwa Kantor DPC partai politik tersebut merupakan pusat aktivitas kaderisasi partai.

### 1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah menggunakan teknik *purposive*. Pada teknik ini informan yang terpilih ialah informan yang memahami budaya kaderisasi partai dan siasat kader partai. Informan yang dipilih oleh peneliti sebanyak lima informan antara lain: 1). Informan – I ialah pengurus partai dan anggota dewan; 2). Informan – II ialah kader partai; 3). Informan – III ialah anggota dewan; 4). Informan – IV ialah pengurus harian dan kader; serta 5). Informan – V ialah pihak luar yang mengetahui budaya kaderisasi partai.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diperlukan teknik yang sesuai guna memudahkan peneliti menggali data yang akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan teknik wawancara mendalam.

#### 1) Observasi

Dalam observasi dengan model Spradley ini, peneliti atau *observer* melakukan pengamatan dengan melakukan partisipasi terhadap aktivitas-aktivitas sosial budaya dalam kelompok etnis yang diteliti (Hanurawan, 2016: 89 - 90). Berdasarkan uraian tersebut maka observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat berlangsungnya acara kaderisasi partai di kantor DPC partai Kota Surabaya. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui budaya kaderisasi yang dilakukan oleh partai terhadap kader-kadernya.

#### 2) Wawancara mendalam

Dalam wawancara mendalam, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang diajukan pada informan kemudian dijawab oleh informan. Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti menyusun pedoman wawancara terlebih dahulu agar proses wawancara mampu menjawab masalah penelitian. Menurut Spradley, ada 3 unsur model wawancara, yaitu secara eksplisit, penjelasan etnografis, dan pertanyaan etnografi. Pengertian wawancara secara eksplisit adalah peneliti terlebih dahulu menjelaskan

maksud dan kedatangan kepada informan. Lalu penjelasan etnografis adalah penjelasan yang diberikan kepada informan mengenai penelitian agar arah wawancara sesuai dan tetap fokus dengan apa yang diteliti. Model wawancara ketiga adalah pertanyaan etnografis, yaitu peneliti diwajibkan memberikan pertanyaan yang mudah dipahami oleh informan supaya peneliti mendapatkan data yang akurat.

#### 1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan model Spradley. Ada empat bentuk analisis data penelitian kualitatif etnografi untuk mencari tema-tema budaya, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. (Sugiyono, 2014:348-362).

- 1) Analisis domain yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Melalui pertanyaan umum dan pertanyaan rinci peneliti menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya. Semakin banyak domain yang dipilih semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan monitour question. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.
- 2) Untuk mengetahui struktur analisis taksonomi, yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus. Analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan semikian domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak (*box diagram*), diagram garis dan simpul (*lines and node diagram*) dan *outline*.
- 3) Analisis komponensial yaitu analisis yang mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antara elemen. Analisis

dilakukan sebagai observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan (*Contras question*). Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik yang berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

- 4) Analisis tema kultural yaitu mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjtnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Berdasarkan analisis budaya tersebut selanjutnya dapat disusun judul penelitian baru, apabila dalam judul dalam proposal berubah setelah peneliti memasuki lapangan.